

PENGARUH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA APARATUR INSPEKTORAT KOTA PALU

FRISUSMITA SARI

frisusmita@yahoo.com

Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstrack

The objectivities of this research are: 1) to determine the influence of guidance and supervision on apparatus performance in The Inspectorate Office of Palu, 2) to determine the influence of guidance on apparatus performance in The Inspectorate Office of Palu, 3) to determine the influence of supervision on apparatus performance in The Inspectorate Office of Palu. This research means to verify the relationship between variables and it involves 36 respondents who selected through census sampling technique. The results show that : 1) guidance and supervision have significant influence on apparatus performance in The Inspectorate Office of Palu, 2) guidance has significant influence on apparatus performance in The Inspectorate Office of Palu, 3) supervision has significant influence on apparatus performance in The Inspectorate Office of Palu.

Keywords: *Guidance, Supervision and Performance*

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan secara lebih adil dan berimbang, perubahan paradigma ini antara lain melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek penataan kelembagaan (organisasi), penataan ketatalaksanaan (*business process*), penataan sumber daya aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah mengalami pergeseran, dari paradigma *rule government* menjadi *good governance*. Dalam rangka mencapai *good governance* maka yang dibutuhkan adalah kinerja aparatur yang professional sehingga

aparatur memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang tugasnya. Walau bagaimanapun juga seorang aparatur yang merupakan bagian dari masyarakat harus bisa menjadi agen perubahan (*agent of change*) sekaligus pendukung utama dalam penyelenggaraan negara.

Pembangunan menuntut adanya suatu kebijakan yang strategis dibidang pembinaan dan pengawasan yang memiliki unsur strategis dan peran dalam memantau kinerja aparatur dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan. Manusia sebagai sumber daya manusia (SDM) keberadaannya sangat penting dalam organisasi, karena SDM menunjang organisasi melalui karya, bakat, kreativitas dan peran nyata seperti yang dapat disaksikan dalam setiap organisasi.

Indra Bastian, (2006) menyatakan pembinaan dalam konteks otonomi daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk memfasilitasi proses penyelenggaraan otonomi. Fasilitasi yang dimaksud disini adalah pemberdayaan daerah otonom melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pembinaan aparatur merupakan pilihan strategis untuk meningkatkan kecakapan, keterampilan, dan keahlian aparatur, dan selanjutnya dapat digunakan untuk menunjang kelancaran tugas rutin sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan untuk dapat menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan nasional.

Rusli B. (2006) dalam Oktavia (2009), secara umum pengawasan bertujuan untuk membantu manajemen pemerintahan dalam 3 (tiga) hal yakni: (1) meningkatkan kinerja organisasi, (2) memberikan opini atas kinerja organisasi, dan (3) mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada. Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan, akan tetapi dilakukan melalui pengusutan, pengujian dan penilaian. Sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan pengawasan pemerintah seharusnya tidak terbatas pada kegiatan verifikasi kebenaran angka-angka dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga meliputi penilaian terhadap ketaatan dan kebijakan yang digariskan, pengamanan aktiva organisasi, pemberdayaan sumberdaya yang dimiliki organisasi, dan yang lebih penting adalah evaluasi terhadap pencapaian kinerja atas standar dan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Pengawasan bertujuan menilai sistem pengendalian manajemen, efisien dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka perbaikan dan atau peningkatan kinerja. Seluruh kegiatan pengawasan harus merupakan upaya yang komprehensif dalam membangun sistem pengendalian intern pemerintah melalui budaya dan etika manajemen yang baik, analisis dan pengelolaan resiko.

Inspektorat Kota Palu adalah salah satu lembaga pengawasan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kota Palu, yang mengemban tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di Kota Palu dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan. Serta memiliki visi “Menjadi lembaga pengawasan yang kredibel dan akuntabel ditunjang oleh sumber daya manusia yang profesional dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis“. Dan untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kota Palu menyelenggarakan salah satu fungsi Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian atas tugas pengawasan.

Aparatur Inspektorat Kota Palu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki tanggung jawab yang besar sehingga aparatur dituntut harus cakap, tangguh dan berkualitas tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya yang di embannya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang dimaksud adalah dengan meningkatkan kinerja aparatur Inspektorat Kota Palu melalui pembinaan dan pengawasan terhadap aparaturnya dengan mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah.

Pembinaan yang dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan terhadap aparatur Inspektorat Kota Palu saat ini hanya dilakukan sekali dalam setahun, setiap aparatur hanya diberikan kesempatan sekali untuk mengikuti pelatihan tersebut. Pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu rutin dilakukan minimal satu kali setiap tahunnya oleh lembaga pengawas internal dalam hal ini Inspektorat Kota Palu atau lembaga pengawasan lainnya,.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dengan maksud agar kinerja aparatur Inspektorat Kota Palu dalam

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Palu dapat lebih efektif. Jika tujuan pembinaan dan pengawasan tersebut terwujud dengan baik maka apa yang dicita-citakan selama ini yaitu terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa akan terealisasi.

Hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Palu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, jika dilihat berdasarkan fakta dan data terhadap hasil temuan atas kerugian/kewajiban setor negara/daerah menunjukkan adanya perubahan kondisi dari tahun ke tahun, dimana setiap tahunnya ada yang mengalami penurunan dan ada juga mengalami peningkatan, Namun

pada tahun 2014, temuan atas kerugian/kewajiban setor negara/daerah meningkat sangat signifikan, sehingga berdampak buruk pada kualitas pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur Inspektorat Kota Palu sebagai lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Aparatur Inspektorat sebagai pelaku pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dapat meminimalisir penyimpangan yang akan terjadi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Tetapi secara substansi hasil pengawasan yang terjadi pada tahun 2014 memberikan penjelasan bahwa kerugian negara/daerah mengalami peningkatan bukan penurunan, sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Hasil Pengawasan Inspektorat Kota Palu

No.	Tahun	Jumlah Temuan Kerugian Negara / Daerah (01)	Jumlah Temuan Kewajiban Setor Negara/Daerah (02)	Total
1	2	3	4	5 = 3 + 4
1	2010	223.396.231,00	124.392.461,91	347.788.692,91
2	2011	116.452.960,00	57.936.930,00	174.389.890,00
3	2012	310.885.854,32	44.116.083,08	355.001.937,40
4	2013	280.338.572,00	40.791.759,00	321.130.331,00
5	2014	301.296.859,00	171.892.106,00	473.188.965,00

Sumber : Sub Bagian Evaluasi, Program dan Pelaporan Inspektorat Kota Palu

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan adanya kinerja aparatur Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan belum maksimal, seharusnya pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan menunjukkan adanya penurunan pada temuan hasil pengawasan, namun pada kenyataannya temuan hasil pengawasan semakin meningkat, sehingga dapat berdampak pada kinerja aparatur Inspektorat yang belum maksimal pula, untuk itu diperlukan adanya pembinaan secara berkelanjutan kepada aparatur Inspektorat Kota Palu untuk mendapatkan pembinaan secara baik dan benar, agar kinerja aparatur inspektorat dapat berjalan efektif dalam menekan angka temuan hasil

pengawasan yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah. Hal yang sama dinyatakan oleh Evi Oktavia, 2009 bahwa efektifitas pengawasan yang dilakukan terhadap SKPD dikatakan efektif apabila temuan hasil pemeriksaan semakin kecil (temuan adminitrasi dan keuangan) maka pengawasan yang dilakukan semakin efektif. Sebaliknya jika temuan hasil pemeriksaan semakin besar, maka pembinaan dan pengawasan yang dilakukan semakin tidak efektif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pembinaan dan pengawasan sangatlah penting untuk dapat mewujudkan kinerja aparatur yang

baik dan profesional, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut kedalam bentuk karya ilmiah (tesis) dengan judul “Pengaruh Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kinerja Aparatur Inspektorat Kota Palu.”

HIPOTESIS PENELITIAN

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

- 1) Pembinaan dan Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Aparatur Inspektorat Kota Palu
- 2) Pembinaan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Aparatur Inspektorat Kota Palu
- 3) Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Aparatur Inspektorat Kota Palu

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian verifikatif yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel dengan menggunakan analisis data bersifat statistik agar dapat menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiono, 2013:8). Penelitian ini akan menjelaskan pengaruh antara variabel pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja aparatur Inspektorat Kota Palu.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kota Palu sejumlah 36 responden dengan kriteria pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda (III/a) dan memiliki kompetensi dan pengalaman dalam melakukan pemeriksaan / pengawasan, monitoring, review maupun dalam pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi berganda, dengan program SPSS 17.0 model regresi linier berganda dapat

dirumuskan sebagai berikut adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_nX_n + e$$

dimana

Y= Kinerja

a= Konstanta

$b_1 - b_2$ = Koefisien Regresi

X_1 = Pembinaan

X_2 = Pengawasan

e = kesalahan pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Regresi

Regresi Linear Berganda merupakan salah satu alat statistik Parametrik dengan fungsi menganalisis dan menerangkan keterkaitan antara dua atau lebih faktor penelitian yang berbeda nama, melalui pengamatan pada beberapa hasil observasi (pengamatan) diberbagai bidang kegiatan. Berkaitan dengan penelitian ini alat analisis Statistik Parametrik Regresi Linear Berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variable indeviden (X_1 dan X_2) terhadap variabel dependen (Y). Dalam konteks penelitian ini Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengukur pengaruh pembinaan (X_1) dan pengawasan (X_2), terhadap kinerja Aparatur Inspektorat Kota Palu.

Sesuai hasil analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan bantuan komputer SPSS *For Wind Release* 17,0 diperoleh hasil-hasil penelitian dari 36 orang responden dengan dugaan pengaruh kedua variabel independen (pembinaan dan pengawasan) terhadap kinerja Aparatur Inspektorat Kota Palu, dapat diketahui hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Perhitungan Regresi Berganda

Dependen Variabel Y = Kinerja Aparatur				
Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	t	Sig
C = Constanta	2,240	0,298	7,529	0,000
X ₁ = Pembinaan	0,280	0,086	3,254	0,003
X ₂ = Pengawasan	0,254	0,071	3,576	0,001
R- = 0,712				
R-Square = 0,507		F-Statistik = 16,963		
Adjusted R-Square = 0,477		Sig. F = 0,000		

Sumber: Hasil Regresi

Model regresi yang diperoleh dari tabel diatas adalah:

$$Y = 2,240 + 0,280X_1 + 0,254X_2$$

Persamaan diatas menunjukkan, variabel independen yang dianalisis berupa variabel (X₁, dan X₂.) memberi pengaruh terhadap variable independen (Y) model analisis regresi kinerja Aparatur Inspektorat Kota Palu dapat dilihat sebagai berikut:

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan:

1. Untuk nilai constanta sebesar 2,240 berarti kinerja Aparatur Inspektorat Kota Palu sebelum adanya variabel independen adalah sebesar 2,240.
2. Pembinaan (X₁) dengan koefisien regresi 0,280 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara pembinaan dan kinerja Aparatur. Artinya semakin baik pembinaan yang dilakukan di Inspektorat Kota Palu maka akan semakin naik kinerja Aparatur.
3. Pengawasan (X₂) dengan koefisien regresi 0,254 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara pengawasan dan kinerja Aparatur. Artinya semakin baik pengawasan yang ada pada Inspektorat Kota Palu maka akan semakin naik kinerja Aparatur.

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Uji simultan adalah sebuah pengujian untuk mengetahui apakah variabel independen (X) yang diteliti memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y) berarti semua variabel bebasnya, yakni pembinaan (X₁), dan pengawasan (X₂), dengan variabel tidak

bebasnya kinerja Aparatur Inspektorat Kota Palu yakni:

Dari Tabel 4.11 terlihat hasil uji determinasi (kehandalan model) memperlihatkan nilai R-Square = 0,507 atau = 50,70%. Hal ini berarti bahwa sebesar 50,70% variabel tidak bebas dipengaruhi oleh kedua variabel bebas, selebihnya variabel tidak bebas dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Selanjutnya berdasarkan tabel 4.10 dari hasil perhitungan diperoleh F_{hitung} = 16,963 pada taraf nyata $\alpha = 0,05$ atau $\alpha < 0,05$. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi F = 0,000. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebasnya.

Dengan demikian maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa: Pembinaan dan Pengawasan secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pegawai Aparatur Inspektorat Kota Palu berdasarkan hasil Uji-F ternyata terbukti.

b. Pengujian Hipotesis Kedua dan Ketiga

Pengujian secara parsial dimaksudkan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya, sebagai berikut:

1. Pembinaan (X₁)

Untuk variabel pembinaan, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,280, sementara

tingkat signifikansi t sebesar 0,003. Dengan demikian nilai $\text{sig } t < 0,05$ pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel pembinaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Aparatur Inspektorat Kota Palu. Dengan demikian maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa: Pembinaan berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja Aparatur Inspektorat Kota Palu, berdasarkan hasil uji- t ternyata terbukti.

2. Pengawasan (X_2)

Untuk variabel pengawasan, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,254, sementara tingkat signifikansi t sebesar 0,001. Dengan demikian nilai $\text{sig } t < 0,05$ pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel pengawasan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Aparatur Inspektorat Kota Palu. Dengan demikian maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa: Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Aparatur Inspektorat Kota Palu, berdasarkan hasil uji- t ternyata terbukti.

Variabel penelitian pengaruh Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kinerja Aparatur Inspektorat Kota Palu dilakukan pembahasannya guna memperoleh gambaran hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pengaruh Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur Inspektorat Kota Palu

Berdasarkan analisis terhadap pengaruh pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja aparatur Inspektorat Kota Palu, diperoleh hasil bahwa variabel kinerja terdiri dari variabel pembinaan (X_1) dan pengawasan (x_2) berpengaruh simultan dan signifikan terhadap kinerja aparatur Inspektorat Kota Palu. Hal ini membuktikan bahwa Aparatur Inspektorat Kota Palu secara umum telah melakukan pembinaan dan pengawasan secara baik dan maksimal berdasarkan indikator-indikator pada variabel pembinaan dan pengawasan

yang dilakukan, serta mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh : (1) Sfaat, (2012) meneliti tentang pengaruh pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pegawai Peradilan Agama Kota Palu menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja. (2) uyat Suyatna, (2003) meneliti tentang pengaruh pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pegawai di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan berpengaruh positif dan simultan terhadap kinerja yang berarti bahwa pembinaan dan pengawasan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat strategis dan menentukan dalam penyelenggaraan pemerintah, karena adanya suatu pembinaan dan pengawasan yang baik dan berkesinambungan dapat menghasilkan sosok aparatur pemerintah dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengetahuan, keterampilan, tanggungjawab dan sikap profesional yang baik, sehingga pada akhirnya mempunyai kemampuan bekerja dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Implikasi hasil penelitian diharapkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur Inspektorat Kota Palu dipertahankan dan ditingkatkan guna peningkatan kinerja aparatur Inspektorat Kota Palu sehingga dapat menjadi aparatur yang lebih cakap, mampu, terampil dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2. Pengaruh Pembinaan Terhadap Kinerja Aparatur Inspektorat Kota Palu

Berdasarkan analisis terhadap pengaruh pembinaan terhadap kinerja aparatur Inspektorat Kota Palu, diperoleh hasil bahwa dimensi pembinaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur Inspektorat Kota Palu. Hal ini menjelaskan bahwa aparatur

Inspektorat Kota Palu memutuskan untuk memilih pembinaan tetap dilaksanakan.

Hasil penelitian tentang pembinaan aparatur dengan memperlihatkan bahwa pembinaan dalam suatu lembaga organisasi mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat strategis dan menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pembinaan aparatur dilaksanakan untuk pertumbuhan dan kesinambungan kualitas aparatur dalam suatu organisasi, yang pada hakekatnya dapat meningkatkan kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui tugas pokok dan fungsinya. Pembinaan aparatur yang baik dan berkesinambungan dapat menghasilkan sosok aparatur pemerintah dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional, dan pada akhirnya mempunyai kemampuan bekerja dalam penyelenggaraan dan penyelesaian tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Hasil penelitian ini relevan dengan:

1) Hasil wawancara dengan lembaga pemerintah yang melaksanakan pembinaan terhadap APIP/Aparatur Inspektorat Kota Palu yaitu Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Pasal 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa “BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional”. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan beberapa fungsi yang salah satunya adalah “pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah”. Adapun hasil wawancara dengan salah seorang pejabat di lingkungan BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi

Tengah yaitu Bapak Y. Heri Sulistiyo (Kepala Bagian Tata Usaha BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah) tanggal 15 Oktober 2015 jam 10.00 wita bertempat di Kantor BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

“Pembinaan yang dilaksanakan pada Inspektorat dalam hubungan dengan Jabatan Fungsional Auditor, dimana jabatan fungsional auditor ini sebagian ada pada Aparatur Inspektorat Kota Palu, pembinaan yang kami lakukan adalah pemberian konsultasi, pendidikan dan pelatihan, seminar, sosialisasi workshop, dengan pembuatan buku saku buat seluruh aparatur Inspektorat bukan hanya di Kota Palu saja tetapi Inspektorat Propinsi dan Juga Inspektorat Kabupaten. Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan dapat di ikuti di Ciawi berdasarkan kelender diklat yang telah disediakan, kelender diklat dapat dilihat melalui website www.bpkp.go.id, biasanya dikirim langsung dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, dalam kalender diklat tersebut aparatur Inspektorat dapat memilih jenis diklat yang ingin di ikuti dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia atau dapat juga membuat kelas mandiri dengan mengundang langsung pemateri dari pihak BPKP. Seminar, sosialisasi, dan workshop dengan cara mengundang seluruh aparatur Inspektorat yang ada di Propinsi/Kabupaten/Kota dan kami memberitahukan jika ada perkembangan terbaru tentang suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Buku saku merupakan inovasi kami yang terbaru untuk aparatur Inspektorat yang ada di Propinsi/Kabupaten/Kota yang diharapkan buku saku ini dapat bermanfaat bagi aparatur karena dalam buku saku ini berisi tentang pengawasan dan jabatan fungsional auditor yang dapat mempermudah APIP dalam mengakses informasi seputar masalah Jabatan Fungsional Auditor (JFA)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, hal tersebut di dukung dengan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Palu terhadap seluruh aparaturnya, dimana Inspektorat Kota Palu telah menyediakan program dan kegiatan dalam rangka pembinaan terhadap aparaturnya, sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Palu dimana anggaran pembinaan masuk dalam program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan nama kegiatan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Inspektorat Kota Palu setiap tahun mengalokasikan anggaran pembinaan guna peningkatan kinerja aparaturnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya alokasi anggaran untuk 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebagai berikut : tahun 2012 sebesar Rp. 339.140.800, tahun 2013 sebesar Rp. 483.058.275 dan tahun 2014 sebesar Rp. 366.900.000. dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa Inspektorat Kota Palu menganggarkan dana untuk kegiatan pembinaan bagi aparaturnya tetapi pada tahun 2014 anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut mengalami penurunan. Adapun data yang diperoleh tersebut merupakan hasil konsultasi terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) an. Ibu Ino Puji Astuti (Kepala Sub Bagian Evaluasi, Program dan Pelaporan Inspektorat Kota Palu) pada tanggal 29 Desember 2015, Jam 10.00 wita bertempat di Kantor Inspektorat Kota Palu menjelaskan bahwa :

“penurunan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dikarenakan adanya pengalokasian anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana Inspektorat Kota Palu. Namun untuk pelaksanaan pembinaan untuk aparatur dilaksanakan sesuai anggaran yang tersedia dan telah di usahakan agar seluruh aparatur Inspektorat dapat mengikuti pembinaan dalam bentuk

pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kinerja aparatur Inspektorat Kota Palu”.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan sangat perlu dilaksanakan guna peningkatan kinerja aparatur Inspektorat Kota Palu, yang intinya semakin baik suatu pembinaan yang dilaksanakan semakin baik pula kinerja aparatur Inspektorat Kota Palu, pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dapat memberikan dampak peningkatan kinerja seorang aparatur semakin baik pula. Pembinaan yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan bimbingan terhadap aparatur Inspektorat Kota Palu memberikan berdampak positif terhadap kinerja sehingga aparatur Inspektorat Kota Palu mendapatkan banyak pengetahuan, keterampilan, keahlian dan kecakapan guna peningkatan kinerja.

- 2) Hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain : (1) Hendrikus Lyzardi Kurniawan, DB. Paranoan, Nur Fitriyah, (2014) tentang pembinaan sumber daya aparatur dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat yang menyatakan bahwa pembinaan aparatur merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku aparatur agar dapat bertindak lebih rasional dan profesional. Pembinaan aparatur juga penting untuk meningkatkan kemampuan, kecakapan, keterampilan dan keahlian, serta menjadikan aparatur sebagai sumber tenaga yang produktif. Karena itu cukup beralasan jika setiap aparatur/pegawai diberikan pembinaan sesuai bakat dan kemampuan sehingga aparatur tersebut dapat berkembang dan meningkatkan kinerja aparatur itu sendiri. (2) Ambita, (2013) meneliti tentang pengaruh pendidikan, pelatihan, dan pembinaan sumberdaya manusia terhadap kinerja pegawai pada Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Semarang menyatakan bahwa terdapat

pengaruh yang signifikan dan positif variable pembinaan terhadap kinerja, sehingga pembinaan terhadap pegawai agar terus dilaksanakan guna peningkatan kinerja.

Penelitian ini setelah dilakukan olah data kuesioner yang disebarkan dapat disimpulkan bahwa pembinaan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Y), hal ini menjelaskan bahwa pembinaan terhadap aparatur di Inspektorat Kota Palu sudah berjalan dengan baik, pembinaan yang dilaksanakan berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis (bimtek), sosialisasi, workshop, seminar dan bimbingan maupun konsultasi sering dilaksanakan oleh aparatur Inspektorat Kota Palu sehingga diharapkan pembinaan yang didapatkan oleh Aparatur Inspektorat Kota Palu dapat diimplementasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah guna pencegahan sedini mungkin terhadap penyimpangan yang akan terjadi.

Implikasi hasil penelitian ini diharapkan agar pembinaan yang dilakukan terhadap aparatur Inspektorat Kota Palu dapat dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga kinerja aparatur Inspektorat Kota Palu semakin sangat baik kedepan, sehingga dapat mengimplementasikan yang telah didapat melalui pembinaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kota Palu sebagaimana tugas pokok dan fungsinya.

3. Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur Inspektorat Kota Palu

Berdasarkan analisis terhadap pengaruh pengawasan terhadap kinerja aparatur Inspektorat Kota Palu, diperoleh hasil bahwa dimensi pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur Inspektorat Kota Palu. Hal ini bermakna bahwa semakin baik pengawasan yang dilaksanakan maka kinerja pegawai juga akan semakin meningkat. Karena pengawasan bertujuan untuk menciptakan

kinerja aparatur penyelenggara negara/daerah yang dapat terkendali dengan baik.

Hasil ini relevan dengan :

- 1) Hasil wawancara terhadap lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap Inspektorat Kota Palu yaitu Inspektorat Propinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana termuat dalam Peraturan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi Sulawesi Tengah. Bahwa Inspektorat Propinsi Sulawesi Tengah melakukan pengawasan dalam hal ini pemeriksaan terhadap Inspektorat Kota Palu setiap tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, kami telah melakukan wawancara terhadap salah seorang pejabat di Lingkungan Inspektorat Propinsi Sulawesi Tengah yaitu Ibu Distyawaty, SH (Kasubag Kepegawai dan Umum) pada tanggal 15 Oktober 2015, Jam 15.00 Wita bertempat di Kantor Inspektorat Propinsi Sulawesi Tengah, hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut :
“Bahwa memang benar sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Propinsi Sulawesi Tengah setiap tahunnya melakukan pengawasan dalam hal ini pemeriksaan terhadap Inspektorat Kota Palu, sebelum dilaksanakan pengawasan dalam hal ini pemeriksaan seluruh Inspektorat Se Sulawesi Tengah mengadakan pertemuan yaitu Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) dalam pertemuan tersebut membahas tentang Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang menjadi keputusan setiap tahun antara Inspektorat Propinsi/ Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengawasan.

Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Propinsi dalam hal ini pelaksanaan pemeriksaan disebut pemeriksaan secara komprehensif dengan materi pemeriksaan antara lain aspek kebijakan daerah, aspek tugas pokok dan

fungsi, aspek keuangan, aspek sumber daya manusia dan aspek pengelolaan barang milik daerah. Dalam pemeriksaan komprehensif tersebut termasuk didalamnya pemeriksaan terhadap kinerja aparatur yang dikategorikan dalam aspek sumber daya manusia. Tapi untuk tahun 2015 ini Inspektorat Propinsi Sulawesi Tengah tidak melakukan pengawasan dalam hal ini pemeriksaan terhadap Inspektorat Kota Palu hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran. Tapi untuk tahun 2015 Inspektorat Kota akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Prop. Sulawesi Tengah (BPK-RI Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah). Dan tahun 2016 Pemeriksaan terhadap Inspektorat Kota Palu akan dilakukan oleh Inspektorat Propinsi Sulawesi Tengah”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, kami telah melakukan konfirmasi terhadap salah seorang pejabat di Inspektorat Kota Palu yaitu Ibu Ino Puji Astuti (Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Inspektorat Kota Palu) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 29 Desember 2015, jam 10.00 wita yang menjelaskan bahwa :

“memang benar Inspektorat Propinsi setiap tahunnya melaksanakan pemeriksaan terhadap Inspektorat Kota Palu secara komprehensif, dan tahun 2015 Inspektorat Propinsi tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap Inspektorat Kota Palu, tetapi Inspektorat Kota Palu di audit oleh BPK-RI Perwakilan Sulawesi Tengah, untuk tahun 2016 Inspektorat Kota Palu diperiksa oleh Inspektorat Propinsi Sulawesi Tengah.

Inspektorat Kota Palu juga telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pengawasan terhadap SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, pengawasan tersebut di laksanakan oleh aparatur Inspektorat Kota Palu, dimana Inspektorat Kota Palu mempunyai program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH dengan nama kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. Inspektorat Kota Palu mengalokasikan anggaran pengawasan sebagai berikut : tahun 2012 sebesar Rp. 575.100.000,-, tahun 2013 sebesar Rp. 1.593.467.600 dan tahun 2014 sebesar Rp 1.645.797.000,-. Dari data tersebut terlihat bahwa setiap tahun anggaran pengawasan Inspektorat Kota Palu meningkat. Hasil konfirmasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) an. Ibu Ino Puji Astuti (Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Inspektorat Kota Palu) pada tanggal 29 Desember 2015, jam 10.00 wita bertempat di Kantor Inspektorat Kota Palu menjelaskan bahwa : *“anggaran pengawasan setiap tahun mengalami peningkatan, ini dikarenakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Palu adalah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Daerah Kota Palu”.*

Dari uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa aparatur Inspektorat Kota Palu selain melakukan pengawasan terhadap SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, aparatur Inspektorat Kota Palu juga diawasi oleh lembaga pengawasan/pemeriksa lainnya antara lain Inspektorat Propinsi Sulawesi Tengah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah, sehingga diharapkan kinerja aparatur Inspektorat Kota Palu dapat lebih di tingkatkan.

Berdasarkan fakta diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan kinerja aparatur Inspektorat Kota Palu. Semakin baik pengawasan yang dilaksanakan semakin baik pula kinerja aparatur Inspektorat Kota Palu. Dan ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini.

- 2) Hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain : 1) Faisal (2005), meneliti tentang pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai di

Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupten Banggai yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh pengawasan terhadap kinerja, pengaruh tersebut adalah pengaruh yang positif yang berarti apabila terjadi peningkatan pada variabel pengawasan, maka peningkatan ini akan diikuti dengan meningkatnya variabel kinerja. 2) Rio Marpaung dan Tri Dinda Agustin (2013), meneliti tentang pengaruh pengawasan dan disiplin terhadap kinerja pegawai pada Kejaksaan Tinggi Riau menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja. Untuk meningkatkan kinerja maka perlu dilakukan peningkatan dalam hal pengawasan sehingga pengawasan dirasakan benar-benar efektif. Dengan adanya pengawasan yang baik dan efektif dapat menimbulkan semangat bagi aparatur/pegawai sehingga meningkatkan kinerja. 3) Rabiaful Akbar, Jumiaty Sasmita dan Liswar Hamid, (2014) meneliti tentang pengaruh pengawasan dan kompetensi terhadap kinerja karyawan pada Hotel Permai Pekanbaru menyatakan bahwa variabel pengawasan secara parsial berpengaruh terhadap variabel kinerja yang berarti bahwa jika terdapat masalah dalam hal pengawasan akan berdampak langsung terhadap kinerja, karena pengawasan bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan agar segala kegiatan didalam suatu organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya seperti yang sudah direncanakan hal ini sejalan dengan tujuan pengawasan yaitu menekankan pada langkah-langkah pembenahan atau koreksi yang obyektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara pelaksanaan dan perencanaannya sehingga tidak memberi pengaruh buruk terhadap kinerja. Dalam makna ini pengawasan juga berarti mengarahkan atau mengkoordinasikan antar kegiatan agar pemborosan sumber daya dapat dihindari. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengawasan (X_2) berpengaruh signifikan

terhadap kinerja (Y), hal ini menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh aparatur Inspektorat Kota Palu dijalankan sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2009 dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Propinsi terhadap aparatur Inspektorat Kota dimaksudkan agar kinerja aparatur inspektorat dapat menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Pelaksanaan pengawasan diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur Inspektorat Kota Palu sehingga setiap aparatur Inspektorat Kota Palu lebih cakap, mampu dan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Implikasi dari Hasil penelitian ini juga diharapkan, pengawasan terhadap aparatur Inspektorat Kota Palu dilaksanakan guna peningkatan kinerja aparaturnya sehingga aparatur Inspektorat Kota Palu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lebih maksimal dan menjadi lebih baik kedepannya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Pembinaan dan Pengawasan secara bersama-sama dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja aparatur Inspektorat Kota Palu.
2. Pembinaan berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja aparatur Inspektorat Kota Palu.
3. Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur Inspektorat Kota Palu

Rekomendasi

1. Lebih meningkatkan pembinaan terhadap aparatur Inspektorat Kota Palu agar menjadi aparatur yang profesional dan memiliki sumber daya aparatur yang berkualitas sehingga dapat melakukan pembinaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Palu untuk menjadi lebih baik.

2. Variabel Pengawasan diharapkan untuk lebih di tingkatkan sehingga Inspektorat Kota Palu sebagai lembaga pengawasan internal yang berada dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu agar dapat melakukan pencegahan sedini mungkin atau meminimalisir penyimpangan yang akan terjadi
3. Untuk kinerja aparatur Inspektorat Kota Palu hendaknya dipertahankan dan terus ditingkatkan menjadi lebih baik.
4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian tentang pembinaan, pengawasan dan kinerja dengan menambah variabel lainnya seperti disiplin kerja, penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap kinerja aparatur Inspektorat Kota Palu dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Sehingga menambah referensi dalam memperkaya ilmu pengetahuan dibidang pembinaan, pengawasan dan kinerja, serta belum pernah diteliti.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. H. Djayani Nurdin, S.E., M.Si selaku Ketua Tim Pembimbing dan Dr. H. Moh. Iqbal, S.E., M.Si, Ak.CA selaku Anggota Tim Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya serta memberi masukan dan petunjuk dalam proses pembimbingan selama ini.

DAFTAR RUJUKAN

- <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/issue/view/247/showToc>
- Ambita, 2013. Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja. *Management Analysis Journal* Vol. 2 No. 2. ISSN 2252- 6552. Universitas Negeri Semarang
- Evi Oktavia, 2009. Analisis Frekuensi Pembinaan dan Efektivitas Pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu. *Tesis* tidak diterbitkan. Palu : Program Pascasarjana Universitas Tadulako
- Faisal, 2005. Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupten Banggai. *Tesis* tidak diterbitkan. Palu : Program Pascasarjana Universitas Tadulako
- Hendrikus Lyzardi Kurniawan, DB. Paranoan, Nur Fitriyah, 2014. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat. *eJournal Administrative Reform*, 2014 2 (3):2116-2129 ISSN 2338-7637. ar.mian.fisip-unmul.ac.id
- <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JSEP/article/view/1702/1677>
- <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/maj/article/view/2509/2304>
- Indra Bastian, 2006. *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 *tentang* Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Palu
- Peraturan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2015 *tentang* Uraian Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Palu
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 *Tentang* Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). <http://www.bpkp.go.id>
- Peraturan Wikota Palu Nomor 40 Tahun 2009 *tentang* Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Palu. Palu
- Rabiaful Akbar, Jumiati Sasmita dan Liswar Hamid, (2014). Pengaruh Pengawasan dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Hotel Permai Pekanbaru *Journal Online Mahasiswa* Vol. 1 No. 2 Oktober 2014. ISSN 2355-6854. Universitas Riau.

- Rio Marpaung, Tri Dinda Agustin, (2013). Pengaruh Pengawasan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kejaksaan Tinggi Riau. *eJournal Sosial Ekonomi Pembangunan* Vol. 3 No. 8, Maret 2013:141-164. ISSN 2087-4502. Universitas Riau.
- Safaat, 2012. Pengaruh Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Peradilan Agama Kota Palu. *Tesis* tidak diterbitkan. Palu : Program Pascasarjana Universitas Tadulako
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*. Cetakan ke-19. Penerbit Alfabeta: Bandung
- Uyat Suyatna, 2003. Pengaruh Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. *Jurnal From JBPTUNPASPP*. Vol. 1 Nomor 2 Januari 2003. Digital Library Universitas Pasundan <http://digilib.unpas.ac.id>.